



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Simpursiang (Gabungan Dinas Lantai II)

Website : www.dpmd.luwuutarakab.go.id, email : dpmd@luwuutarakab.go.id M A S A M B A

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 400.60 / 571 /DPMD/2025

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara. Telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(4)
1	Biodata Elektronik ASN (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Mengungkap Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4	Daftar Nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. pp No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai	Mengungkap Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5	Data Rekam Medis PNS	1. UUD No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/IIII/2008 Pasal 12 dan 13	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Tidak Terbatas

6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	1. UUD No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/IIII/2008 Pasal 12 dan 13	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	Terbatas sampai dengan pelantikan
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. UUD No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
8	Daftar Username dan Password Website SKPD	UU No. 11 Tahun 2011 tentang IT	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Selama Password/kode berlaku
9	Laporan pertanggungjawaban Keuangan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi Dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Sampai di Audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan Nilai pengadaan yang akurat	Selama Proses pengadaan barang dan jasa
11	Dokumen pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang dirahasiakan	Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Selama Proses pengadaan barang dan jasa
12	Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan	Dapat memperlancar proses audit internal	Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/persentase eksternal
13	Kode akses/password aplikasi elektronik : SIMRAL/e-planing, e-RFK	UU No. 11 Tahun 2011 tentang IT	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Selama Password/kode berlaku

14	Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi Dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
15	Kode Akses elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
16	Laporan keuangan belum diaudit	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
17	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dana desa	PP No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menghambat kegiatan desa yang sementara berjalan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dan aktivitas didesa yang berjalan lancar	Tidak Terbatas
18	Kode akses Siskeudes	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Konsistensi dokumen desa	Tidak Terbatas
19	Notulen Rapat berdasarkan sifatnya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Melindungi dan mengamankan data	Tidak Terbatas
20	Dokumen perjanjian kerjasama yang dikecualikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat merugikan kepentingan hubungan kedua belah	Melindungi dan mengamankan data	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	KAMALUDDIN ALNAN, S.Pd.MM	Plt. Kepala Dinas (selaku Atasan PPID Pelaksana)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	NURDALIA JALUDDIN,SE	Plt. Sekretaris Dinas (selaku PPID Pelaksana)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	HASNIATI, S.AN	Kasubag Umum dan Kepegawaian (selaku Sekretaris)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	RAHMAWATI KALADEN,SE	Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa (Selaku Pengelola Informasi Publik)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	NASIRAH,SH.MH	Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa (Selaku Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	NANANG ARIANTO, S.Sos	Kabid. Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat (selaku Pengelola Dokumentasi dan Arsip)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	ANDI WILDANA MANGKONA,SE	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (selaku Pelayanan Informasi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Masamba, 27 Oktober 2025

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS


KAMALUDDIN ALNAN, S.Pd.,M.M

Pkt. : Pembina Tk.I

NIP : 19680618 200502 1 004